

Evaluasi Kualitas Mutu Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Khusus Alokasi Dana Desa (ADD 2019) (Studi Kasus Kecamatan Depati Tujuh)

Glodea Aura Zalsa¹, Ade Nurdin², M.Nuklirullah³

¹ Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi

^{2,3}Dosen Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian, Km 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi, Telp. (0741) 583377

Email: glodeaaura3@gmail.com, adenurdin@unja.com, m.nuklirullah@unja.com

ABSTRAK

Sebagai Engineer kualitas suatu pembangunan dilihat dari perencanaan dan pengendalian pekerjaan agar mencapai pembangunan yang baik. Kualitas produk akhir dan tidak terpenuhi, bangunan berimplikasi pada umur struktur di karenakan Penyimpangan prosedur pekerjaan yang seringkali diabaikan oleh masyarakat, menjadikan harapan kualitas akhir produk tidak dapat tercapai. Dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa maka perencanaan dan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan dalam bentuk fasilitas konstruksi yang berkualitas yang bisa di gunakan dalam umur panjang untuk tercapainya keinginan masyarakat yang di harapkan oleh pemerintah desa. Untuk itu di harapkan dalam penggerakan pengujian mutu harus diutamakan dalam bidang struktur agar infrastruktur yang di harapkan tercapai pada umur rencana dan memuaskan. di wilayah Kecamatan Depati Tujuh yang terletak di kabupaten kerinci yang merupakan wilayah pertanian memerlukan perhatian dari aspek mutu pembangunan yang di terapkan pada perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan pada pedesaan yang merupakan pembangunan lepas yang biasanya sering di lakukan oleh pihak desa saja tidak ada penggunaan jasa manajemen konstruksi. Bertepatan dari hal itu maka pengendalian proyek yang di lakukan oleh desa dilakukan dengan seadanya, dan mengandalkan pendamping desa untuk mengendali pelaksanaan proyek. Kemudian mengenai hasil penelitian yang mendapatkan angka 99,12% dapat di simpulkan bahwa pada pelaksanaan yang di lakukan oleh desa menurut data yang di dapatkan yaitu sebagaimana pada panduan skala pada Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Pembangunan drainase pedesaan pada pemeriksaan yang di lakukan di penelitian melakukan pembangunan dengan sesuai dengan yang sudah di rencanakan dengan skala kategori yang BAIK.

Kata Kunci: Kualitas, Mutu, Infrastruktur, Drainase

ABSTRACT

As an Engineer the quality of a development is seen from the planning and control of work in order to achieve good development. The quality of the final product and is not met, the building has implications for the age of the structure due to irregularities in work procedures that are often ignored by the community, making the expectations of the final product quality unattainable. In supporting the welfare of the village community, planning and procurement includes identifying needs in the form of quality construction facilities that can be used for a long time to achieve the wishes of the community expected by the village government. For this reason, it is expected that in the mobilization of quality testing, priority must be given to the structure so that the expected infrastructure is achieved at the planned and satisfactory life. in the Depati Tujuh sub-district which is located in the Kerinci district which is an agricultural area requires attention from the quality aspect of development that is applied to planning and implementation. The implementation of development in rural areas which is a freelance development which is usually often carried out by the village alone does not involve the use of construction management services. Coinciding with this, the project control carried out by the village was carried out in a modest manner, and relied on village assistants to control project implementation. Then regarding the results of the study which got a figure of 99.12%, it can be concluded that in the implementation carried out by the village the data obtained were as in the scale guide in the Depati Tujuh District, Kerinci Regency. has been planned with a GOOD category scale.

Keywords: *Quality, Quality, Infrastructure, Drainage*

1. PENDAHULUAN

Di era modern ini, pemerintahan melakukan pembangunan besar-besaran untuk bertransformasi menjadi

daerah yang maju. Pembangunan infrastruktur menitikberatkan pada terwujudnya masyarakat adil maupun sejahtera yang merata material dan spiritual, menurut Pancasila serta UUD 1945. Pengembangan yang di harapkan dapat memenuhi fasilitas masyarakat

dengan pencapaian yang optimal sebagai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini berhubungan dengan fasilitas yang di laksanakan oleh pemerintah yaitu fasilitas konstruksi yang berkualitas. Konstruksi yang di lakukan senantiasa memperhatikan asas pembangunan di antaranya adalah bahwa seluruh kontribusi atau usaha pada aktivitas pembangunan imfrastruktur harus memberi manfaat yang besar bagi kemanusiaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat.

Berdasarkan informasi survey dari lingkungan masyarakat bahwasanya pada pembangunan yang di lakukan oleh desa sudah baik dalam memenuhi fasilitas yang di butuhkan di dalam desa. Namun dari segi kualitas dan juga , pembangunan yang di lakukan hanya di lakukan oleh warga desa secara gotong royong atau musyawarah dan penyediaan fasilitator seperti pendamping desa untuk mengatur desain anggaran biaya dan DED.

Sebagai Engineer kualitas suatu pembangunan dilihat dari perencanaan dan pengendalian pekerjaan agar mencapai pembangunan yang baik. Kualitas produk akhir dan tidak terpenuhi, bangunan berimplikasi pada umur struktur di karenakan Penyimpangan prosedur pekerjaan yang seringkali diabaikan oleh masyarakat, menjadikan harapan kualitas akhir produk tidak dapat tercapai.

Tujuan dari penelitian ini yaitu memeriksa bagaimana pembangunan konstruksi alokasi dana desa tahun 2019 apakah sudah sesuai realisasi dengan perencanaan yang sudah di lakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

2. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

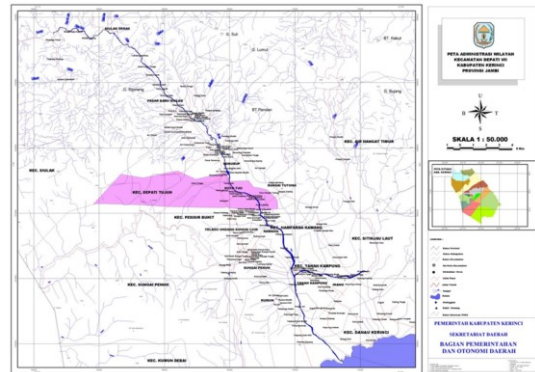
Aktivitas penelitian ini berlokasi pada lokasi di wilayah Kecamatan Depati Tujuh bertepatan pada daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Dimana jumlah desa yang akan menjadi populasi dari penelitian yaitu sebagaimana yang dari data yang terdaftar dalam Badan Pembangunan Daerah yaitu sebanyak 20 desa. Nama-nama yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Nama Desa Kecamatan Depati Tujuh

| NO | Nama Desa |
|-----|------------------------------------|
| 1. | Desa Baru Kubang, |
| 2. | Desa Belui, |
| 3. | Desa Belui Tinggi, |
| 4. | Desa Kayu Aho Mangkak Koto Lanang, |
| 5. | Desa Koto Lanang, |
| 6. | Desa Koto Panjang |
| 7. | Desa Koto Payang |
| 8. | Desa Koto Simpai Kubang |
| 9. | Desa Koto Tuo |
| 10. | Desa Kubang Agung |
| 11. | Desa Kubang Gedang |
| 12. | Desa Ladeh |

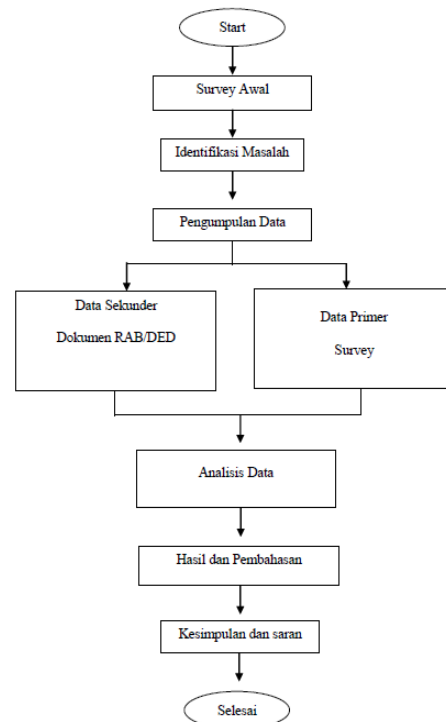
| | |
|-----|----------------------|
| 13. | Desa Lubuk Suli |
| 14. | Desa Pahlawan Belui |
| 15. | Desa Sekungkung |
| 16. | Desa Semumu |
| 17. | Desa Simpang Belui |
| 18. | Desa Tambak Tinggi |
| 19. | Desa Tebat Ijuk Dili |
| 20. | Desa Tebat Ijuk |

(sumber : Data Penelitian)



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

Skema Penelitian



Gambar 2. Diagram alir

Desa Dan Dana Desa

Secara administratif, desa merupakan bagian dari pemerintahan dan dijalankan oleh walikota desa melalui pemilihan langsung masyarakat.

Menurut Buku Saku Dana Desa, Dana Desa merupakan dana APBN desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan diutamakan untuk pembangunan perumahan maupun pemberdayaan masyarakat pedesaan. Alokasi Dana Desa yang juga dapat disebut ADD merupakan wujud dari perwujudan hak melaksanakan otonomi desa, yang tumbuh dan maju mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri, menurut keragaman, keikutsertaan, serta keunikan otonomi serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur

Menurut Neil S., Grig (1998), dalam pengembangan infrastruktur penelitian ini, infrastruktur ialah drainase, irigasi, transportasi, bangunan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari berbagai jenis masyarakat, dan sistem fisik lainnya yang menyediakan layanan publik. fasilitas. Dan kebutuhan sosial ekonomi.

Kemudian untuk kepentingan Berdasarkan pendapat Kodoatie (2005), infrastruktur sebagai penopang utama sistem sosial serta sistem ekonomi dilakukan dalam cakupan yang terintegrasi dan inklusif. Infrastruktur adalah basis yang dikembangkan untuk fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik yang tidak bisa dijalankan secara mandiri dan terisolasi. Integrasi ini mendefinisikan nilai optimalisasi layanan infrastruktur itu sendiri.

Kualitas Mutu Infrastruktur

Dalam industri konstruksi, terdapat tiga hal krusial yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi yakni waktu dan biaya kualitas (Kerzner,2006).

Dalam permasalahan di desa terdapat pembangunan lepas oleh pemerintahnya yang pada hakikatnya mengabaikan kualitas pada pembangunannya, padahal fungsi utama dari salah satu pembangunan yaitu kualitas atau mutu yang akan di terapkan di suatu konstruksi.

Dalam perjalanannya, proses ini terbilang sederhana, sebab membutuhkan serangkaian pekerjaan teknis yang dapat menghasilkan karakteristik kualitas tertentu. (Rovelly, 2019).

Serangkaian tugas teknis melibatkan pemantauan proses kerja dan mengidentifikasi dan memperbaiki persoalan yang ada untuk meningkatkan efisiensi proses kerja (Kerzner 2011).

Dengan hal ini dunia konstruksi masing-masing proses pekerjaan berpengaruh terhadap hasil akhir berupa mutu yang memuaskan pengguna.

Mutu pada infrastruktur merupakan suatu hal yang menjadi patokan agar pemakainya menjadi aman dan nyaman dalam menggunakannya, Hal tersebut berupa bangunan air, bangunan gedung, bangunan jembatan, dan bangunan transportasi dan bangunan yang berkaitan dengan bangunan sipil. Menyesuaikan dengan pekerjaan

infrastruktur yang di terapkan di lapangan untuk mencapai syarat sebagaimana Menurut Dalimin 1986, untuk mencapai hasil pembangunan/ pelaksanaan struktur yang baik, demi tercapainya standart yang di tetapkan harus memunuhi beberapa syarat :

1. Perencanaan yang baik.
2. Pelaksanaan yang baik dan sempurna.

Evaluasi

Evaluasi ialah elemen dari sistem manajemen yang berupa pengelolaan, rancangan, pelaksanaan, pemantauan, serta penilaian. Tanpa evaluasi, kita tidak tahu seperti apa keadaan suatu objek dalam hal desain, eksekusi, dan hasil. Istilah evaluasi ialah kosakata bahasa Indonesia, namun kata tersebut adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yang artinya penilaian (Echols dan Shadily, 2000 : 220).

Disisi lain dalam definisi istilah “penilaian adalah suatu aktivitas yang direncanakan untuk mengetahui kondisi suatu objek dengan memakai alat dan hasil dilakukan perbandingan dengan suatu kriteria untuk menarik kesimpulan” (Yunanda, 2009).

Untuk menimbang suatu kriteria, Anda dapat mengukur apa yang sedang dievaluasi dan membandingkannya dengan kriteria tersebut. Oleh karena itu, evaluasi didasarkan pada evaluasi langsung yang semata-mata didasarkan pada evaluasi, bukan proses mengukur dan kemudian mengevaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Crawford (2000, 13) yang mendefinisikan penilaian sebagai proses menemukan/menguji apakah suatu aktivitas program, proses aktivitas, atau hasil sesuai dengan tujuan atau standar yang diberikan.

Dalam hubungannya dengan evaluasi Moh. Rifai (1986) berikut penjelasan tentang beberapa hal menurut fungsinya:

- a. Evaluasi sebagai pengukur kemajuan;
- b. Evaluasi sebagai alat perencanaan;
- c. Evaluasi sebagai alat perbaikan

Sumber Data

1. Data Sekunder
Data sekunder yaitu berupa dokumen RAB/DED atau Gambar Rencana.
2. Data Primer
Data primer yaitu berupa survey langsung di lapangan

Pengolahan Data

1. Nilai capaian program
Nilai capaian program merupakan nilai yang di ambil dari data observasi langsung dari lapangan. Data ini di masukan dalam bentuk persentase yang di olah dari perbandingan data perencanaan dan realisasi. Dengan persamaan sebagai berikut.

$$\text{Nilai capaian program (\%)} = \frac{\text{realisasi}}{\text{perencanaan}} \times 100$$
2. Bobot program
Bobot program merupakan syarat angka patokan dalam penjumlahan yang di gunakan untuk

mendapatkan nilai capaian akhir dari aktivitas.
Bobot = 100

3. Nilai capaian akhir nilai dari nilai capaian program.
4. Jumlah nilai capaian kebijakan
Jumlah nilai capaian kebijakan di gunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah nilai capaian kebijakan (\%)} = \frac{(\text{kegiatan 1}) + (\text{kegiatan 2}) + \dots}{\text{jumlah kegiatan}}$$

Kesimpulan dari hasil evaluasi harus memberikan gambaran mengenai nilai kinerja otoritas. Kinerja pemerintah hanyalah penilaian dalam skala reguler yang disusun menurut pertimbangan masing-masing instansi. Hasil berupa nilai evaluasi kemudian dirumuskan dengan pembobotan setiap elemen aktivitas sehingga pengukuran secara keseluruhan memberikan gambaran kualitas siklus. Menurut panduan Kategori kualitas dan ambang nilai yang di gunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. kategori penilaian

| Interval | Kategori |
|----------------|------------|
| $71 < N < 100$ | Baik |
| $56 < N < 70$ | Cukup Baik |
| $N < 55$ | Kurang |

(Sumber : Panduan Perencanaan Dan Sinkronisasi Program Infrastruktur WPS)

Keterangan : N=nilai

Hasil dari penjumlahan capaian substansi akan di uraikan dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, dengan capaian persentase skor yang di capai dalam pelaksanaan penelitian dimana yang di khususkan adalah pembangunan drainase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah struktur khusus Drainase yang di bangun di dalam desa sekecamatan Depati Tujuh dengan program dana Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2019. Alasan memilih struktur khusus Drainase menurut observasi awal bahwa pembangunan yang di laksanakan di desa 50% dari perencanaan pembangunan lebih banyak di bangun Drainase yang di bangun dengan Anggaran Dana Desa Tahun 2019.

Tabel 3. Objek Penelitian

| NO | Nama Desa | Jenis Drainase |
|----|-------------------------------------|-------------------|
| 1. | Desa Koto Tuo | Drainase Tertutup |
| 2 | Desa Tebat Ijuk Dili | Drainase Tertutup |
| 3 | Desa Kayu Aho Mangkak (Koto Lanang) | Drainase Terbuka |
| 4 | Desa Belui | Drainase Terbuka |
| 5 | Desa Tebat Ijuk | Drainase Tertutup |
| 6 | Desa Koto Payang | Drainase Terbuka |

| | | |
|----|-------------------------|-------------------|
| 7 | Desa Tambak Tinggi | Drainase Terbuka |
| 8 | Desa Kubang Gedang | Drainase Tertutup |
| 9 | Desa Sekungkung | Drainase Terbuka |
| 10 | Desa Ladeh | Drainase Tertutup |
| 11 | Desa Baru Kubang | - |
| 12 | Desa Belui Tinggi | - |
| 13 | Desa Koto Lanang | - |
| 14 | Desa Koto Panjang | - |
| 15 | Desa Koto Simpai Kubang | - |
| 16 | Desa Kubang Agung | - |
| 17 | Desa Lubuk Suli | - |
| 18 | Desa Pahlawan Belui | - |
| 19 | Desa Semumu | - |
| 20 | Desa Simpang Belui | - |

(sumber : Data Penelitian)

Dari nama-nama desa di atas, terdapat 10 desa di kecamatan depati tujuh yang membangun infrastruktur ke pembangunan lain. Yaitu berupa pembangunan Gedung, rehabilitasi bangunan, perbaikan akses lintas masyarakat/jalan lingkungan usaha tani dan pengalihan pembangunan jembatan.

Namun dari pada permasalahan tersebut, peneliti mengambil sebagian lokasi pengujian di desa di kawasan Kecamatan Depati Tujuh untuk di uji kelayakan perencanaan dengan realisasi Dari pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa dengan menggunakan pengadaaan Anggaran Dana Desa Pada Tahun 2019 di kecamatan depati tujuh. Titik tersebut bisa di lihat pada tabel diatas.

Jenis Drainase

Berdasarkan hasil dari penelitian jenis drainase pembangunan konstruksi yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yaitu jenis drainase tertutup dan hanya sebagian jenis drainasenya terbuka. Berikut merupakan data lengkap dari setiap desa.

Tabel 4. Jenis Drainase

| No. | Jenis Drainase | Jumlah | Persentase |
|-----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Drainase Tertutup | 5 | 25% |
| 2 | Drainase Terbuka | 5 | 25% |
| 3 | Non drainase | 10 | 50% |
| | Jumlah | 20 | 100% |

(sumber : Data Penelitian)

Dari tabel di atas, diketahui drainase tertutup yang diteliti pada Kecamatan Depati Tujuh Yaitu berjumlah 5 bangunan drainase dengan persentase 50%. Kemudian angka jenis drainase terbuka sebanyak 5 bangunan dengan presentasi sebanyak 50%. Dan desa yang tidak ada pembangunan drainase sebanyak 50% Dari perjumlahan total persentase sebelumnya, jenis drainase tertutup dengan drainase terbuka adalah berjumlah sama dengan persentase akhir yaitu 100%.

Pengolahan Data

1. Perbandingan data rencana dengan realisasi

Dari dimensi yang di dapat dari lapangan di dapatkan hasil berupa luas dan volume dari objek yang di teliti, masing-masing data di jumlahkan dengan rumus luas dan volume sebagai berikut.

a. Desa Koto Tuo

Pada Desa Koto Tuo Anggaran Dana Desa Tahun 2019 dilakukan pembangunan Drainase jenis Tertutup. Aktivitas pembangunan di lakukan dengan tiga lokasi wilayah di sekitar Desa Koto Tuo. Analisis perhitungan perbandingan dari data yang di dapatkan yaitu sebagai berikut :

- Analisis perbandingan

Tabel 5. Data Penelitian Desa Koto Tuo Aktivitas 1

| No. | Instrumen | Data perencanaan (m) | Data realisasi (m) |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Panjang | 26,6 | 26,6 |
| 2. | Lebar | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Kedalaman / Tinggi | 0,6 | 0,6 |

(sumber : Data Penelitian)

Aktivitas 1

Luas perencanaan (m^3) = Panjang x Lebar x kedalaman
 $= 26,6 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 23,94 \text{ m}^3$

Luas realisasi (m^3) = Panjang x Lebar x kedalaman
 $= 26,6 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 23,94 \text{ m}^3$

Bobot = 100%

Nilai capaian aktivitas = $\left(\frac{\text{luas/volume realisasi}}{\text{luas/volume perencanaan}} \right) \times 100 \%$
 $= \left(\frac{23,94}{23,94} \right) \times 100 \%$
 $= 100\%$

Tabel 6. Data Penelitian Desa Koto Tuo Aktivitas 2

| No. | Instrumen | Data perencanaan (m) | Data realisasi (m) |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | Panjang | 117,4 | 117,4 |
| 2. | Lebar | 1,2 | 1,17 |
| 3. | Kedalaman / Tinggi | 0,6 | 0,6 |

(Sumber : Data Penelitian)

Aktivitas 2

Luas perencanaan (m^3) = Panjang x lebar x kedalaman
 $= 117,4 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 84,52 \text{ m}^3$

Luas realisasi (m^3) = Panjang x lebar x kedalaman
 $= 117,4 \text{ m} \times 1,17 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 82,41 \text{ m}^3$

Bobot = 100%

Nilai capaian aktivitas = $\left(\frac{\text{luas/volume realisasi}}{\text{luas/volume perencanaan}} \right) \times 100 \%$
 $= \left(\frac{82,41}{84,52} \right) \times 100 \%$
 $= 97,50\%$

Tabel 7. Data Penelitian Desa Koto Tuo Aktivitas 3

| No. | Instrumen | Data perencanaan (m) | Data realisasi (m) |
|-----|-----------|----------------------|--------------------|
| 1. | Panjang | 113,5 | 113,5 |

| | | | |
|----|--------------------|-----|------|
| 2. | Lebar | 1,2 | 1,17 |
| 3. | Kedalaman / Tinggi | 0,6 | 0,6 |

(Sumber : Data Penelitian)

Aktivitas 3

Luas perencanaan (m^3) = Panjang x Lebar x kedalaman
 $= 113,5 \text{ m} \times 1,2 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 81,72 \text{ m}^3$

Luas realisasi (m^3) = Panjang x Lebar x kedalaman
 $= 113,5 \text{ m} \times 1,17 \text{ m} \times 0,6 \text{ m}$
 $= 79,77 \text{ m}^3$

Bobot = 100%

Nilai capaian aktivitas = $\left(\frac{\text{luas/volume realisasi}}{\text{luas/volume perencanaan}} \right) \times 100\%$
 $= \left(\frac{79,77}{81,72} \right) \times 100\%$
 $= 97,50\%$

- Total nilai capaian aktivitas

Total nilai capaian seluruh aktivitas :
 $= \frac{100 + 97,5 + 97,5}{3}$

= 98,33 %

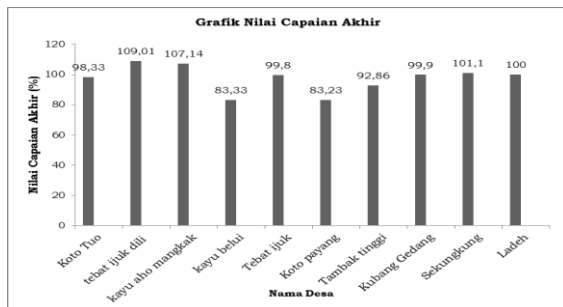
Rekap Capaian Akhir

Berdasarkan penelitian peneliti mengumpulkan data dari setiap desa yaitu berupa data perencanaan atau dokumen RAB/Gambar rencana dan data dimensi di lapangan. Kemudian di olah dan di analisis dengan yang sudah tertera pada subab sebelumnya. Peneliti langsung melakukan rekapan data yang sudah di dapat dan di dapatlah nilai hasil akhir. Berikut merupakan rekapan dari pengumpulan data yang berdasarkan dari form pengukuran dimensi di lapangan.

Tabel 8. Rekap Data

| NO | Nama Desa | Bobot (%) | Nilai Capaian Akhir Program (%) | Skala capaian |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Desa Koto Tuo | 100 | 98,33 | Baik |
| 2 | Desa Tebat Ijuk Dili | 100 | 109,01 | Baik |
| 3 | Desa Kayu Aho Mangkak | 100 | 107,14 | Baik |
| 4 | Desa Belui | 100 | 83,33 | Baik |
| 5 | Desa Tebat Ijuk | 100 | 99,8 | Baik |
| 6 | Desa Koto Payang | 100 | 83,23 | Baik |
| 7 | Desa Tambak Tinggi | 100 | 92,86 | Baik |
| 8 | Desa Kubang Gedang | 100 | 99,9 | Baik |
| 9 | Desa Sekungkung | 100 | 101,1 | Baik |
| 10 | Desa Ladeh | 100 | 100 | Baik |
| Jumlah | | 100 | 991,21 | |
| Nilai rata-rata capaian akhir | | | 99,12 | Tercapai/Baik |

(Sumber : Data Penelitian)



Gambar 3. Grafik nilai capaian akhir

Dari tabel dan grafik di atas bisa dilihat bahwasanya pada jumlah capaian akhir dari seluruh data dari desa-desa yang dikunjungi yaitu terdapat nilai capaian akhir aktivitas tertinggi terdapat pada Desa Tebat Ijuk Dili dengan nilai capaian akhir yaitu sebesar 109,01%. Kemudian nilai capaian akhir aktivitas terendah diketahui terdapat pada Desa Koto Payang yaitu sebesar 83,23%. Dari data yang didapat yaitu nilai akhir capaian aktivitas/ program di rata-ratakan yaitu menjadi 99,21 dengan persentase nilai rata-rata capaian akhir berjumlah 99,12%.

Dari deskripsi di atas terdapat batas tertinggi dari rekap data yaitu senilai 109,01% ini dikarenakan bahwa dilihat dari tingkat swadaya masyarakat yang tinggi menjadi pengaruh dari meningkatnya persentase perbandingan dari angka perencanaan dengan angka realisasinya. Swadaya masyarakat di sini diartikan sebagai keahlian masyarakat itu sendiri untuk mengelola sumber daya alam desa (widiyahseno dan said, 2007).

Pembangunan di daerah Kecamatan Depati Tujuh termasuk pada skala Tercapai/Baik. diketahui pada penjelasan dalam buku panduan skala kategori apabila skor akhir hasil supervisi antar 71 s/d 100 maka di kategorikan ke dalam lingkup skala BAIK

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya setiap desa memiliki cara pembangunan yang Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Kecamatan Depati Tujuh sendiri, pembangunan desa dilakukan atau dikelola oleh pemerintah desa dengan bantuan pendamping desa.

Dari hasil data rekap sebelumnya, dapat dideskripsikan yaitu bahwasanya pada jumlah capaian akhir dari seluruh data dari desa-desa yang dikunjungi yaitu terdapat nilai capaian akhir aktivitas dengan nilai capaian akhir mencapai 100% yaitu terdapat pada 1 desa dengan kategori skala baik. Kemudian jumlah capaian akhir dari seluruh rekap desa dengan nilai capaian di bawah 100%

yaitu terdapat pada 6 desa dengan rata-rata kategori skala baik.

Kemudian dari data itu rekap data terdapat 3 desa yang mendapat skala capaian akhir program yang lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan dilihat dari tingkat swadaya masyarakat tinggi dan masih di kategorikan pada skala baik. Dan dari beberapa capaian akhir dari desa-desa pada beberapa wilayah penelitian, Hal ini memacu pada pembangunan yang pada realisasinya menyesuaikan dengan keadaan lapangan.

Kemudian mengenai hasil penelitian yang mendapatkan angka 99,12% bisa ditarik kesimpulan jika pada pengimplementasian yang dijalankan oleh desa menurut data yang didapatkan yaitu sebagaimana pada panduan skala pada Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci Pembangunan drainase pedesaan pada pemeriksaan yang dilakukan di penelitian melakukan pembangunan dengan sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan dengan skala kategori yang BAIK.

Saran

Pada penelitian ini didapat lah saran yang akan menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk bisa dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Desa

Perlu adanya peningkatan kemampuan oleh pemerintah daerah terutama dalam hal Menyusun desain anggaran infrastruktur pedesaan agar setiap desa dapat mengelola pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur desa itu sendiri sesuai dengan kaidah ilmu Teknik sipil tanpa harus menggunakan jasa dari pihak ketiga, sehingga dapat menghemat uang pengeluaran perbelanjaan dari desa itu sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan melihat keterbatasan yang dilakukan pada penelitian ini, disarankan bahwa pada penelitian selanjutnya bisa menghitung lebih detail dan penambahan materi yang didasarkan pada kemampuan masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengelola pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Edison. 2009. Penelitian dan Evaluasi Dalam Bidang Pendidikan: Evaluasi CIPP, (Online), (<http://ed150n5.blogspot.com/2009/04/evaluasi-cipp.html>)
- Fuddin Van B. 2007. Evaluasi Program, (Online), (<http://fuddin.wordpress.com/2007/07/17/evaluasi-program/>)
- Inggit Kurniawan. 2009. Pengertian dan Konsep Evaluasi, Penilaian dan Pengukuran (Online), (<http://santriw4n.wordpress.com/2009/11/>)

- 18/pengertian -dan-konsep -evaluasi- penilaian- dan-pengukuran/)
- Mbulu, J. 1995. Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan Model, dan Prosedur Pelaksanaan. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas.
- Mulyono. 2009. Penelitian Evelyasi Kebijakan, (Online), (<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/13/penelitian-evaluasi-kebijakan/>)
- Rika Dwi Kurniasih. 2009. Teknik Evaluasi Perencanaan, (Online), (<http://images.rikania09.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SUdfiwoKCF8AADuyo-81/Rika%20Eva.doc?nmid=148657139>)
- Tayipnapi, F.Y. 1989. Evaluasi Program. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Zulharman. 2007. Evaluasi Kurikulum : Pengertian, Kepentingan Dan Masalah Yang Dihadapi, (Online), (<http://zulharman79.wordpress.com/2007/08/04/evaluasi-kurikulum-pengertian-kepentingan-dan-masalah-yang-dihadapi>)
- Departemen Pekerjaan Umum. 2007, Pedoman Membuat laporan hasil pemeriksaan (INA.5230.313.24.07.07), jakarta
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:14/PRT/M/2007, Pedoman Umum Pemeriksaan Dalam Rangka Pengawasan Fungsional Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, pedoman teknis pengendalian mutu. Jakarta.
- Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat badan pengembangan sumberdaya manusia. 2017. Modul pengendalian pengawasan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Bandung.